

**DAMPAK WANPRESTASI TERHADAP SENGKETA JUAL BELI
SAHAM TANPA KESEPAKATAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM (RUPS) DI PT. KELUARGA SAKINAH GROUP**

Aisyah Shafa Pramasari¹, Hervina Puspitosari²

UPN Veteran Jawa Timur

Email: 20071010275.student.upnjatim.ac.id@gmail.com¹, hervina.ih@upnjatim.ac.id²

Abstrak: Perseroan Terbatas merupakan kegiatan usaha yang berbadan hukum terdiri atas persekutuan modal yang didirikan atas dasar suatu perjanjian antar para pihaknya untuk menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi atas saham. PT sebagai subjek hukum yang salah satu kegiatannya adalah dalam jual beli saham yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perselisihan terkait jual beli saham dapat saja timbul, sehingga permasalahan yang diangkat sebagai penelitian bertujuan untuk mendalami mekanisme yang dapat dilakukan penyelesaian perselisihan dalam jual beli saham tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada PT Keluarga Sakinah Group di Caruban melalui penelitian empiris yang melibatkan pengumpulan data studi lapangan di PT Keluarga Sakinah Group. Jual beli saham dianggap tidak sah karena tidak terpenuhi syarat objektif dan subjektif suatu perjanjian yang menimbulkan ketidakpastian dalam dokumen perusahaan dan menghambat proses operasional seperti penerbitan sertifikat kepemilikan saham oleh notaris. Studi ini menunjukkan bahwa terlebih dahulu menawarkan mekanisme yang fleksibel dan efisien untuk menyelesaikan perselisihan agar menjaga reputasi perusahaan, dan menjaga kepercayaan pemegang saham yaitu melalui non-litigasi, namun apabila tidak berhasil maka dapat dilakukan melalui litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Penelitian ini menyoroti pentingnya mematuhi persyaratan hukum dan perlunya solusi yang adil dalam sengketa transaksi saham.

Kata Kunci : Sengketa, Jual, Saham, Dan Pemegang Saham.

Abstract: A capital partnership established on the basis of an agreement between investors to carry out business activities with authorized capital divided into shares. PT as a legal subject, one of its activities is the sale and purchase of shares which is regulated based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Disputes related to the sale and purchase of shares can arise, so the problem raised as research aims to explore the mechanism by which a marriage can be resolved in the sale and purchase of shares without the approval of the General Meeting of Shareholders (GMS) at PT Keluarga Sakinah Group in Caruban through empirical research involving the collection of studies field data at PT Keluarga Sakinah Group. Buying and selling shares is not considered valid because the objective and subjective requirements of an agreement are not fulfilled, which creates violations in company documents and hampers operational processes such as the issuance of share ownership certificates by a notary. This study shows that first offering a flexible and efficient mechanism to resolve disturbances in order to protect company property and maintain shareholder trust, namely through non-litigation, but if this is not successful, it can be done through litigation by filing a lawsuit in court. This research highlights the importance of complying with legal requirements and the need for fair solutions in enforcing share transactions.

Keywords: Disputes, Sell, Shares And Shareholders.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman terhadap pasar modal menjadi peran penting dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya dalam aktivitas usaha untuk meningkatkan pembangunan perekonomian suatu negara berlandaskan demokrasi yang berprinsip pada kebersamaan, keadilan, kemandirian, efisiensi untuk menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi negara. Pembangunan perekonomian dalam transaksi bisnis banyak ditemukan masyarakat khususnya Perseroan Terbatas (yang disebut sebagai PT). PT yakni aktivitas usaha yang berbadan hukum terdiri dari persekutuan modal yang dibuat atas dasar sebuah perjanjian pada setiap pihaknya untuk menjalankan aktivitas usaha pada modal dasar yang tersusun atas saham berlandaskan UU (UU) No. 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas (berikutnya disingkat UUPT).

Anggaran dasar yang dilaporkan serta diumumkan sebagai akta pendirian PT yang tidak hanya mengikat bagi pendiri PT saja, melainkan juga mengikat pada pemegang saham, organ perusahaan serta para pihak yang melaksanakan transaksi yang mempunyai kaitan dengan PT. Anggaran dasar mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum dan organisasi sebagai bentuk perikatan yang mengatur pendirian dan pengelolaan dari suatu perusahaan yang dikenal sebagai akta pendirian. Saham yakni kepemilikan modal ataupun dana dalam sebuah perusahaan, yang mencerminkan nilai nominalnya serta memberikan hak dan kewajiban sebagai wujud utama sebab pada prinsipnya saham sebagai kendali bagi perseroan.

Perjanjian pada jual beli saham oleh pemilik saham kepada pihak lain yang dibuat berdasarkan kata sepakat salah satu dasar atau asas yang mengatur dalam perjanjian yaitu asas konsensualitas yang merupakan suatu perjanjian lahir sejak kata sepakat diucapkan dengan itikad baik yang mengacu pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata serta sukarela berlandaskan keyakinan dan kemauan yang baik para pihaknya serta secara tertulis dalam akta pemindahan hak dihadapan notaris. Perjanjian pada aktivitas jual beli saham menyebabkan terjadinya pemindahan hak atas saham yang dipunyai.

Permasalahan awal dalam sengketa jual beli saham PT Keluarga Sakinah Group sebagai perseroan tertutup terjadi saat kegiatan rutin perseroan yakni RUPS untuk melaksanakan pengecekan pada laporan anggaran tahunan perusahaan. Laporan keuangan ada nilai yang diketahui tidak sesuai serta tidak diketahui jumlah nilai saham yang dijual serta pemegang saham yang berada di PT Keluarga Sakinah Group dengan nilai saham yang dijual kepada pihak ketiga diluar PT tersebut. Kegiatan jual beli saham yang dilaksanakan salah satu di antara pemegang saham dinilai tidak mengacu pada ketentuan anggaran dasar yakni tidak adanya pemberitahuan terkait harga serta persyaratan penjualan dengan menyampaikan informasi pada organ perseroan terkait penawaran nilai saham yang dijual tersebut.

Mekanisme jual beli saham pemegang saham yang tidak sesuai pasal 57

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang juga diatur dalam anggaran dasar PT Keluarga Sakinah Group dapat dikualifikasikan sebagai tindakan wanprestasi oleh salah satu pemegang saham karena tidak memenuhinya mekanisme jual beli saham. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap dampak yang dapat diterima oleh PT karena terjadi sengketa jual beli saham.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum empiris yakni penelitian terhadap kenyataan lapangan ataupun keadaan nyata dilingkungan masyarakat yang tujuannya ialah untuk menemukan berbagai fakta untuk bisa digunakan sebagai data ataupun bahan pada penelitian, yang lalu menganalisisnya untuk memperjelas permasalahan dan pada akhirnya mengarah pada suatu penyelesaian. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer hasil dari pengumpulan informasi dan penemuan data melalui studi lapangan di PT. Keluarga Sakinah Group dan data sekunder yakni data yang diraih secara tidak langsung dari sesuatu objek lewat sumber lain seperti peraturan perUUan, buku, jurnal, majalah, koran, dokumen berkaitan tentang jual beli saham.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Sengketa Jual Beli Saham Tanpa Kesepakatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Studi Kasus Di PT Keluarga Sakinah Group)

Perseroan terbatas sebagai salah satu badan usah yang modal perseroannya tercantum dalam anggaran dasar berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha. Pada kegiatannya terdapat organ perusahaan sebagai bagian yang memiliki peran penting untuk efisiensi operasional dalam mencapai tujuan perusahaan yang terdiri dari pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Kegiatan bisnis dalam perusahaan seringkali masih terdapat permasalahan serta melupakan kontrak yang tertera dalam anggaran dasar yang telah disepakati sehingga menyebabkan terjadinya sengketa seperti halnya yang terjadi dalam PT. Keluarga Sakinah Group. Penjualan saham baru diketahui saat RUPS dilakukan dengan melakukan pengecekan laporan keuangan yang mana terdapat nominal yang tidak diketahui oleh organ perusahaan yaitu komisaris saat melakukan pengecekan atau mengamati dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan anggaran perusahaan. Sengketa muncul karena adanya jumlah saham yang dijual dinilai terlalu kecil dan tidak adanya pembicaraan atau persetujuan terlebih dahulu dari organ perusahaan atau instansi berwenang.

Pada mekanisme pemindahan saham lewat jual beli saham tentunya ada perjanjian yang dilaksanakan para pihak yang terlibat. Pemegang saham yang akan mengikatkan dirinya serta pemegang saham yang membeli saham, sebelumnya tentunya harus ada persetujuan dari beberapa pihak satu di antaranya organ perusahaan lewat suatu perjanjian. Perjanjian yang dilaksanakan tersebut wajib mencapai unsur esensial pada pasal 1475 KUHPdata yakni para pihak yang akan mengadakan suatu perjanjian dengan saling mengikatkan dirinya dengan menyerahkan suatu kebendaan dan/ataupun membayar harga kepada pihak lain sesuai yang dijanjikan . Pada peristiwa jual beli yang mengikatkan para pihaknya lewat suatu perjanjian harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian berlandaskan KUHPdata pada Pasal 1320, yakni :

1. Adanya kesepakatan.
2. Kecakapan para pihak

3. Suatu hal tertentu
4. Adanya sebab yang halal

Syarat-syarat pasal 1320 KUHPdata tersebut menjadi pokok penting dari suatu perjanjian khususnya menyangkut pada kegiatan jual beli. Apabila satu di antara pihaknya tidak melaksanakan syarat sah tersebut maka satu di antara pihaknya bisa melaksanakan pembatalan pada perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Penentuan mekanisme pada penerbitan, kepemilikan dan/ataupun perubahan hak milik atas saham PT yang tercantum pada pasal 56 UU No. 40 tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas didasarkan atas kesepakatan tiap PT dan pada pasal 57 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa mekanisme pemindahan hak atas saham yang dipunyai oleh tiap saham dilaksanakan dengan cara berikut :

- a. Penawaran terhadap saham diharuskan terlebih dahulu pada pemegang saham dalam PT yang sama atau pemegang saham lain dengan klasifikasi tertentu;
- b. Adanya persetujuan terlebih dahulu yang wajib dilaksanakan oleh organ perseroan dan/atau;
- c. Harus adanya persetujuan dari instansi berwenang berlandaskan ketentuan perUUan.

Pada peristiwa pemindahan hak atas saham lewat jual beli yang unsurnya sebagai perbuatan hukum berlandaskan anggaran dasar suatu PT. Jual beli saham tersebut yang terjadi wanprestasi akibat ketidaksesuaiannya pada anggaran dasar maka perbuatan yang dilaksanakan pemegang saham tanpa adanya persetujuan RUPS seperti halnya yang diatur pada anggaran dasar dibidang tidak mencukupi ataupun melanggar syarat sah pada melaksanakan perbuatan pemindahan hak atas saham lewat jual beli. Ketidaksahan dalam peristiwa jual beli saham tersebut diakibatkan sebab tidak terpenuhinya syarat subyektif serta syarat objektif berlandaskan pasal 1320 BW. Pemegang saham yang tidak melaksanakan prestasinya dalam anggaran dasar sehingga peristiwa tersebut tidak sah sebab alasan- alasan yang menyertakan:

1. Pelanggaran terhadap syarat subjektif perjanjian yakni cacat kehendak dalam perjanjian awal sebab melaksanakan kekhilafan terhadap peristiwa jual beli saham untuk alasan pribadi yang telah ditetapkan pada Pasal 1320 ayat (1) yakni:

- a. Pelanggaran terhadap pasal 1320 tersebut sebab adanya ketidaksepakatan antara pemegang saham yang menjual dengan organ-organ perusahaan yang lain untuk mengikat diri dalam menjual sahamnya yang tidak dilaksanakan lewat RUPS. Kesepakatan jual beli saham pada pemegang saham PT. Keluarga Sakinah Group dengan organ perseroan ataupun RUPS tidak terpenuhi sebab tidak meraih persetujuan terhadap nilai saham yang dijualkannya.

1. Pelanggaran Terhadap Syarat Objektif Suatu Perjanjian Yang Diputuskan Pada 1320 Ayat (3) Dan (4), Berupa :

- a. Peristiwa jual beli saham yang melanggar yakni adanya perjanjian yang tak mencukupi sebab adanya alasan yang tidak diperbolehkan yakni prosedur pemindahan hak atas saham dinilai tidak sesuai dalam anggaran dasar dalam PT dan Pasal 57 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas;
- b. Perjanjian harus ada kausa yang halal sebagai pemrakarsa kesediaan debitor untuk mencapai kewajibannya yang timbul sebab perikatan. Pada PT.Keluarga Sakinah group pemrakarsa yang diberikan yakni anggaran dasar yang menyertai para organ perusahaan serta pihak-pihak dalam perusahaan. Pemegang saham yang menjual sahamnya tidak ada kesepakatan serta kegiatan dalam jual beli saham yang dilaksanakan tidak berlandaskan pada organ perusahaan RUPS yang terkait mekanisme jual beli dalam anggaran dasar PT.Keluarga Sakinah Group.

Perjanjian jual beli yang dilaksanakan antara satu di antara pemegang saham PT.Keluarga Sakinah serta pemegang saham lain ialah tidak sah sebab tidak mencapai syarat sahnya suatu perjanjian pada pasal 1320 KUHPdata. Mekanisme jual beli yang dilaksanakan tanpa

kehadiran pemegang saham yang lain lewat keputusan RUPS memberikan efek terhadap keabsahan pada pemindahan hak atas saham. Keputusan RUPS dalam Perseroan Terbatas mempunyai perang penting untuk memegang ataupun akan menentukan kesepakatan pada rancangan jual beli saham dengan pihak lain yang akan dibeli.

Dampak Sengketa Jual Beli Saham Tanpa Kesepakatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Studi Kasus Di PT Keluarga Sakinah Group)

Pentingnya anggaran dasar untuk mengatur ataupun mengelola operasional perusahaan supaya bisa berjalan dengan baik, jelas dan stabil. Terciptanya lingkungan yang stabil dalam perusahaan terhadap kebijakan yang diatur tersebut masih banyak yang menyalahgunakan ataupun melanggar peraturan yang berlaku dalam anggaran dasar perseroan. Satu di antaranya yang terjadi dalam permasalahan antara pemegang saham serta pemegang saham yang lain, permasalahan tersebut terjadi sebab pemegang saham melaksanakan wanprestasi.

Timbulnya dampak terhadap permasalahan tersebut berpengaruh terhadap ketidakpastian pada dokumen perusahaan berupa akta autentik atau akta notaris yang berkaitan dengan transaksi jual beli saham serta daftar pemegang saham yang baru setelah terjadi pemindahan hak melalui jual beli saham. Dokumen berupa daftar pemegang Saham yakni suatu dokumen yang berisikan data informasi terkait identitas dari para pemegang saham yang memiliki saham atau nomor kolektif pada saham berupa jumlah telah disetor setiap nilai saham dan keterangan keterangan lainnya yang dirasa perlu memiliki kaitan dengan kepemilikan saham oleh Perseroan Terbatas . Perlunya daftar pemegang saham yang dipunyai oleh setiap perseroan yang wajib disimpan dan wajib mengadakan oleh direksi perseroan berlandaskan pasal 50 UU No. 40 tahun 2007 terkait perseroan perseroan terbatas . Adanya daftar pemegang saham dari suatu PT menjadi bentuk bukti kepemilikan saham dari pemilik saham sehingga akan melekat serta pemegang saham. Daftar pemegang saham yang sudah dilaksanakan jual beli saham apabila tidak diperbarui maka menyebabkan ketidakakuratan serta tidak akurasi pada kepemilikan saham yang dipunyai oleh para pemegang saham.

Dampak lain akibat adanya sengketa jual beli saham yang dilaksanakan pemegang saham tersebut berdampak pada status akta autentik yakni akta jual beli yang tidak pasti. Terhambanya pada status akta autentik tersebut menyebabkan proses operasional menjadi terhambat sebab notaris tidak bisa menerbitkan akta tersebut. Akta pemindahan hak atas saham sebagai pernyataan bahwa pemegang saham secara langsung melaksanakan jual beli saham, sehingga perlu adanya pernyataan dari notaris. Akta kepemilikan saham yang melekat pemegang saham baru yang sudah membeli saham maka sebagai bukti supaya pemegang saham melaksanakan beragam haknya yang sudah dipunyainya dalam suatu PT, kondisi terkait sudah diatur pada Pasal 52 ayat 1 dan 2 UUPT. Pihak-pihak yang sudah terdaftar dalam daftar pemegang saham suatu PT maka mempunyai wewenang untuk memakai hak kepemilikan sahamnya yang berlandaskanUUPT . Pemegang saham baru yang belum terdaftar berdampak pada ketidakpastian atas saham yang dibelinya maka tidak meraih hak untuk melaksanakan mengatur ataupun menjalankan segala hal yang mempunyai kaitan dengan PT.

Bukti kepemilikan akta yang diterbitkan oleh notaris pada pemegang saham haruslah mengacu pada jumlah saham yang dipunyainya dan sudah disetujui oleh organ perusahaan ataupun perusahaan yang sesuai anggaran dasar perseroan. Pasal 51 UU Perseroan Terbatas mengatur bahwa perseroan mempunyai kewajiban untuk memberikan pada pemegang saham terkait bukti kepemilikan saham mengacu pada jumlah saham yang dipunyainya dan sudah disetujui yang lalu juga diitetapkan kedalam dasar . Seluruh hal yang akan dituangkan dalam akta haruslah mengacu pada kesepakatan para pihak untuk memberikan kepastian bagi para pihak yang nantinya akan melaksanakan perbuatan hukum keperdataan yang mempunyai kaitan pada perseroan. Dampak-dampak yang disebabkan adanya perselisihan pada jual beli saham juga

berdampak pada rasa kurang percaya bagi para pemegang saham yang lain terhadap perusahaan yang akan melaksanakan jual beli saham sehingga merugikan reputasi perusahaan dan tentunya perlu adanya penyesuaian dengan kondisi sebab adanya ketidakpastian terhadap dokumen-dokumen yang belum akurat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh pemegang saham di PT. Keluarga Sakinah Group tanpa adanya persetujuan dari RUPS sehingga terjadi wanprestasi akibat ketidaksesuaiannya pada anggaran dasar maka tidak mencukupi atau melanggar syarat-syarat perjanjian yang sah berdasarkan KUHPerdata pada Pasal 1320 dan mengacu pada Pasal 57 (1) huruf b UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Syarat-syarat hukum perdata yang tidak terpenuhi berupa syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian, maka perjanjian jual beli saham tidak sah. Transaksi jual beli yang tidak sah oleh pemegang saham tersebut berdampak pada ketidakakuratan daftar pemegang saham dan terhambatnya pada status akta autentik tersebut menyebabkan proses operasional menjadi terhambat karena belum pasti dan jelasnya saham yang dimiliki pemegang saham. Status akta autentik yakni akta jual beli yang tidak pasti. Terhambatnya pada status akta autentik tersebut menyebabkan proses operasional menjadi terhambat. Adanya ketidakpastian terhadap dokumen-dokumen yang belum akurat menyebabkan rasa kurang percaya bagi para pemegang saham yang lain terhadap perusahaan yang akan melaksanakan jual beli saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, Kornelous dan Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Junal Gema Keadilan*, 7(1): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>
- Handini, S. dan E. D. A. (2020). *Teori Portofolio Dan Pasar Modal Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Karissa, N. R., & Tobing, D. M. L. (2022). Status dan Peralihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas Milik Pemegang Saham yang Meninggal Dunia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(4): 1–8. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3537>
- Karissa, N. R., & Tobing, D. M. L. (2022). Status dan Peralihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas Milik Pemegang Saham yang Meninggal Dunia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(4): 1–8. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3537>
- Mario, Dian, dkk. (2020). Keabsahan Pengalihan Saham Tanpa Melalui Perjanjian Jual Beli. *Jurnal Jatiswara*, 35(2), 233–244. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.246>
- Maydner, Lize, dkk. (2021). Ketidakabsahan Pemindahan Hak atas Saham Akibat Transaksi Menggunakan Cek Kosong (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Register P ta Register Perkara Nomor 51/PD a Nomor 51/PDT/2019/PT T/2019/PT.DKI.). *Indonesian Notary*, 3(29), 1–24.
- Subagiyo, D. T. dkk. (2017). *Hukum Perusahaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Suhadi, E. dan A. A. F. (2021). Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian*. *Inovasi Peneltian*, 2(7), 1967–1978. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1078>
- Sutedi, Adrian. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses. H,15
- Zakiyah. (2015). *Hukum Perjanjian*. Lingkar Media.